



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TASWIR
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 785641

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.170.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m²/100 m² di KAB / KOTA KUTAI KARTANEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m²/130 m² di KAB / KOTA KOTA BONTANG , HASIL SENDIRI Rp. 490.000.000
3. Tanah Seluas 5625 m² di KAB / KOTA KOTA BIMA , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah Seluas 300 m² di KAB / KOTA KOTA BIMA , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/120 m² di KAB / KOTA KUTAI KARTANEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 176.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
4. MOTOR, YAMAHA 55S (T135SEC) Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 500.000



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.346.500.000
III. HUTANG	Rp.	100.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.246.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.